



KERAWANAN PILKADA 2020 JELANG PUNGUT HITUNG

Indeks Kerawanan Pilkada 2020

DEFINISI DAN TUJUAN

**SEGALA HAL YANG MENGGANGGU
ATAU MENGHAMBAT PROSES PEMILU
YANG DEMOKRATIS**

Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri,
karakteristik, dan kategori kerawanan

Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan
deteksi dini

DIMENSI PEMUTAKHIRAN IKP PILKADA 2020

KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

Keamanan, Otoritas
Penyelenggara Pemilu,
Relasi Kuasa di Tingkat
Lokal.

PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

Hak Pilih, Pelaksanaan
Pemungutan Suara,
Pengawasan Pemilu.

KONTESTASI

Praktik Politik Uang.

PARTISIPASI

Partisipasi Pemilih,
Partisipasi Partai Politik,
Partisipasi Publik.



KONTEKS PILKADA DI TENGAH PANDEMI

INDIKATOR KERAWANAN PANDEMI COVID19

PENYELENGGARA PEMILIHAN

Positif Covid19
Meninggal Dunia
Karena Covid19
Mengundurkan Diri
Melanggar Protokol
Kesehatan

PESERTA PEMILIHAN

Positif Covid19
Melanggar Protokol
Kesehatan
Menciptakan
Kerumunan

KONDISI DAERAH

Perubahan Status
Wilayah
Lonjakan Jumlah
Orang Positif Covid-19
Lonjakan Pasien
Meninggal Dunia
Keterbatasan Fasilitas
Kesehatan

PROVINSI RAWAN TINGGI ASPEK PANDEMI COVID19

**PROVINSI (PILGUB)
RAWAN TINGGI :
9 PROVINSI**

KEPULAUAN RIAU	95.4
SUMATERA BARAT	89.7
JAMBI	87.4
BENGGULU	86.2
KALIMANTAN TENGAH	79.3
SULAWESI TENGAH	78.2
KALIMANTAN SELATAN	73.6
SULAWESI UTARA	73.6
KALIMANTAN UTARA	67.8

KERAWANAN KAB/KOTA ASPEK PANDEMI COVID19

10 KAB/KOTA DENGAN KERAWANAN TERTINGGI

Kabupaten/Kota (Pilbup/Pilwali)

Rawan tinggi : 62 kabupaten/kota
Rawan sedang : 199 kabupaten/kota
Rawan rendah : -

KABUPATEN TELUK WONDAMA
KABUPATEN AGAM
KABUPATEN NATUNA
KABUPATEN PURWOREJO
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KOTA SEMARANG
KABUPATEN TUBAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
KABUPATEN PURBALINGGA

IKP PILKADA 2020 KABUPATEN/KOTA

MUTAKHIR



10 KAB/KOTA DENGAN IKP PILKADA 2020 TERTINGGI

1	KAB. MANOKWARI	78.85
2	KOTA SUNGAI PENUH	76.19
3	KOTA TERNATE	66.73
4	KAB. KENDAL	65.39
5	KAB. MAMUJU	65.14
6	KOTA TANGERANG SELATAN	64.62
7	KAB. LAMONGAN	64.11
8	KAB. TELUK WONDAMA	63.87
9	KAB. AGAM	63.42
10	KAB. KOTABARU	62.88

10 KAB/KOTA DENGAN KERAWANAN TERTINGGI BERDASARKAN DIMENSI

KONTEKS SOSIAL POLITIK

PENYELENGGARAAN PEMILU BEBAS ADIL

KONTESTASI

PARTISIPASI POLITIK

1	Kota Sungai Penuh	89.84	Kabupaten Manokwari	88.01	Kota Tangerang Selatan	82.74	Kab. Kotawaringin Timur	93.60
2	Kab. Manokwari	78.66	Kab. Teluk Wondama	69.87	Kota Bukittinggi	76.83	Kab. Kotabaru	85.08
3	Kab. Mamuju	77.66	Kota Makassar	69.45	Kota Sungai Penuh	75.68	Kab. Mamuju	84.38
4	Kab. Lamongan	71.99	Kab. Lombok Tengah	67.82	Kab. Sintang	75.44	Kab. Teluk Wondama	84.15
5	Kab. Pasangkayu	70.00	Kab. Kepulauan Sula	67.31	Kota Ternate	74.96	Kab. Purworejo	83.20
6	Kab. Agam	69.69	Kab. Serang	66.34	Kab. Bantul	74.70	Kota Sungai Penuh	80.84
7	Kab. Karawang	67.57	Kab. Halmahera Barat	64.20	Kab. Maros	72.11	Kab. Simalungun	80.18
8	Kab. Cianjur	64.99	Kab. Manggarai	64.07	Kab. Semarang	70.69	Kab. Tojo Una-una	79.17
9	Kota Makassar	64.96	Kab. Kotawaringin Timur	63.08	Kab. Kepulauan Selayar	69.85	Kab. Manokwari	79.06
10	Kab. Muna	64.76	Kab. Sintang	62.92	Kab. Kendal	69.73	Kab. Kediri	78.47



IKP PILKADA 2020 PROVINSI

MUTAKHIR



RANKING IKP PILKADA 2020 PROVINSI

1	SULAWESI UTARA	87.43
2	SUMATERA BARAT	86.57
3	JAMBI	79.13
4	SULAWESI TENGAH	75.57
5	BENGKULU	74.86
6	KALIMANTAN SELATAN	72.26
7	KALIMANTAN TENGAH	68.77
8	KEPULAUAN RIAU	66.53
9	KALIMANTAN UTARA	64.38

RANKING KERAWANAN PROVINSI BERDASARKAN DIMENSI

KONTEKS SOSIAL POLITIK

PENYELENGGARAAN PEMILU BEBAS ADIL

KONTESTASI

PARTISIPASI POLITIK

1	Jambi	92.48	Sulawesi Utara	86.87	Sumatera Barat	91.27	Sumatera Barat	100.00
2	Sulawesi Utara	89.63	Sumatera Barat	79.15	Bengkulu	84.73	Sulawesi Utara	95.55
3	Sumatera Barat	83.35	Jambi	73.51	Sulawesi Utara	80.60	Kalimantan Tengah	93.60
4	Sulawesi Tengah	78.38	Sulawesi Tengah	71.38	Kalimantan Selatan	71.86	Bengkulu	88.27
5	Bengkulu	68.54	Kalimantan Tengah	69.39	Sulawesi Tengah	71.44	Jambi	87.84
6	Kalimantan Selatan	68.05	Kalimantan Selatan	69.38	Kepulauan Riau	66.43	Kalimantan Selatan	87.11
7	Kepulauan Riau	66.90	Bengkulu	66.25	Jambi	64.62	Sulawesi Tengah	85.22
8	Kalimantan Tengah	63.05	Kalimantan Utara	65.25	Kalimantan Tengah	60.00	Kalimantan Utara	83.20
9	Kalimantan Utara	61.12	Kepulauan Riau	60.53	Kalimantan Utara	55.98	Kepulauan Riau	77.94

KABUPATEN/KOTA

ISU STRATEGIS



HAK PILIH



KAB. MANOKWARI
KAB. TELUK WONDAMA
KAB. BOYOLALI
KAB. SINTANG
KAB. PASAMAN BARAT
KOTA TANGERANG SELATAN
KAB. FAKFAK
KAB. TANAH DATAR
KAB. MALAKA
KAB. KONAWE SELATAN

KAB. KAIMANA
KAB. SIJUNJUNG
KAB. INDRAMAYU
KAB. PESAWARAN
KAB. SERANG
KAB. TASIKMALAYA
KAB. SEMARANG
KAB. KEDIRI
KOTA BALIKPAPAN
KAB. MAMBERAMO RAYA

KAB. NIAS
KOTA MEDAN
KAB. BANDUNG
KAB. PURWOREJO
KAB. DEMAK
KAB. TUBAN
KAB. PASER
KOTA MAKASSAR
KAB. BURU SELATAN
KAB. NUNUKAN

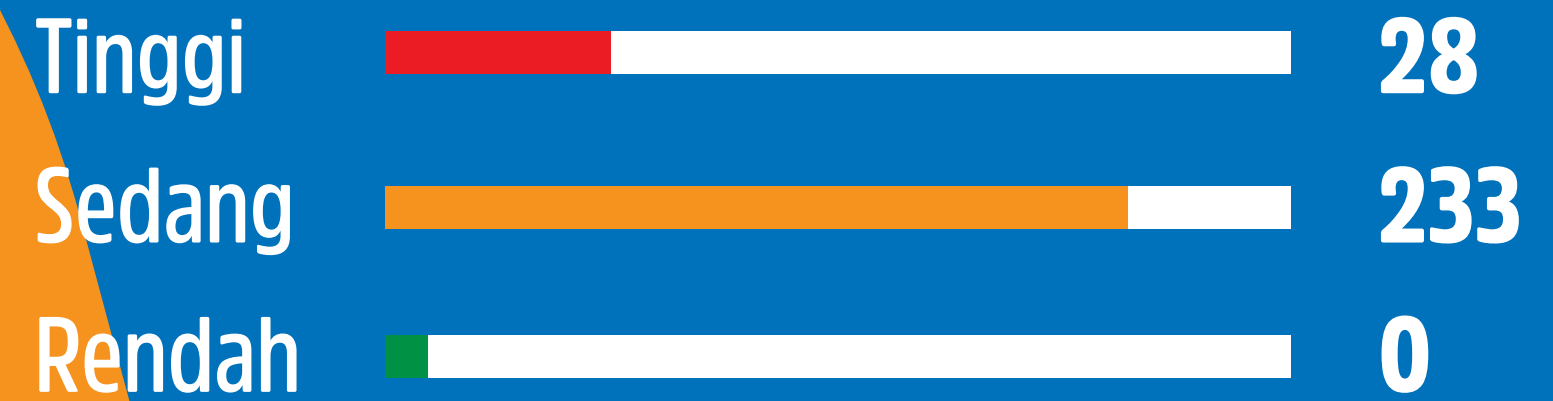
PENOLAKAN PILKADA KARENA COVID19



KOTA DEPOK
KOTA BALIKPAPAN
KAB. TELUK WONDAMA
KOTA MEDAN
KOTA SIBOLGA
KOTA SOLOK
KAB. ROKAN HILIR
KAB. PESISIR BARAT
KOTA TERNATE
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

KOTA TANGERANG SELATAN
KAB. KARAWANG
KOTA SEMARANG
KAB. LAMONGAN
KAB. LOMBOK TENGAH
KAB. SUMBA BARAT
KAB. PASANGKAYU
KAB. SIGI
KAB. GOWA
KAB. FAKFAK

POLITIK UANG

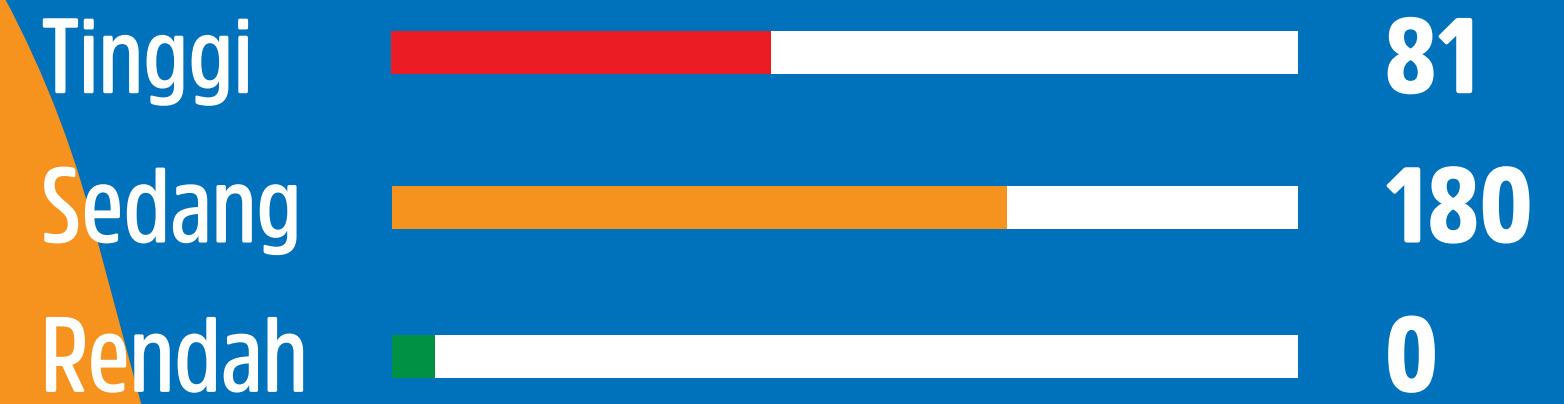


- KAB. TASIKMALAYA
- KAB. BOYOLALI
- KAB. KEDIRI
- KAB. MELAWI
- KAB. KUTAI BARAT
- KOTA BALIKPAPAN
- KAB. TELUK WONDAMA
- KAB. PASANGKAYU
- KAB. JEMBER

- KAB. LINGGA
- KAB. BULUKUMBA
- KAB. HALMAHERA BARAT
- KOTA TANGERANG SELATAN
- KAB. SRAGEN
- KAB. MANGGARAI
- KAB. GRESIK
- KAB. NUNUKAN
- KAB. LOMBOK TENGAH

- KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- KAB. MAMUJU TENGAH
- KAB. MAROS
- KAB. AGAM
- KAB. BANDUNG
- KAB. INDRAMAYU
- KAB. LAMONGAN
- KAB. BANYUWANGI
- KAB. BONE BOLANGO

JARINGAN INTERNET



KAB. SERDANG BEDAGAI
KAB. MANDAILING NATAL
KOTA PEMATANGSIANTAR

KAB. SOLOK
KOTA SOLOK

KAB. NATUNA
KAB. LINGGA

KOTA SUNGAI PENUH

KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
KAB. REJANG LEBONG

KAB. MUSI RAWAS UTARA
KAB. PESISIR BARAT
KAB. KENDAL

KAB. LAMONGAN
KAB. MELAWI

KAB. SINTANG

KAB. BENGKAYANG

KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
KAB. HULU SUNGAI TENGAH

KAB. BERAU

KAB. SUMBAWA BARAT
KAB. SUMBAWA
KAB. SUMBA TIMUR

KAB. SABU RAIJUA
KAB. MAMUJU

KAB. POSO

KAB. MANOKWARI SELATAN

KAB. TELUK WONDAMA
KAB. PEGUNUNGAN ARFAK

KAB. KEEROM

KAB. MAMBERAMO RAYA
KAB. MERAUKE
KAB. TOJO UNA-UNA

KAB. LUWU UTARA
KAB. TANA TORAJA

KAB. KEPULAUAN SELAYAR

KAB. GOWA

KAB. MUNA
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
KAB. BURU SELATAN

KESIMPULAN

Tidak ada daerah yang memiliki kerawanan rendah baik di provinsi maupun kabupaten/kota;

Terjadi peningkatan jumlah daerah dengan kerawan tinggi pada semua isu yaitu:

Aspek Pandemi (dari 50 menjadi 62 kab/kota atau **meningkat 24%**),
Hak Pilih (dari 66 menjadi 133 kab/kota atau **meningkat 101%**),
Politik Uang (dari 19 menjadi 28 kab/kota atau **meningkat 47%**), dan
Jaringan Internet (dari 67 menjadi 81 kab/kota **meningkat 21%**);

Peningkatan jumlah daerah yang rawan tinggi disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, dan penggunaan teknologi informasi yang meningkat namun tidak disertai penyediaan perangkat serta peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan;

Kerawanan tinggi pada provinsi yang menyelenggarakan pilgub dikontribusi oleh kerawanan pada dimensi konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Isu pandemi Covid-19 turut memperparah kerawanan;

Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

REKOMENDASI

Penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye dan pemilih selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;

Penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, satuan tugas penanganan Covid-19 berkoordinasi dalam keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan proses dalam pemungutan dan penghitungan suara;

Koordinasi kepolisian dan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan di luar proses penyelenggaraan pemilihan pada hari pemungutan suara;

Koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah (Dukcapil) dalam memastikan pemilih yang berhak dapat menggunakan suaranya;

Kepastian penggunaan teknologi informasi oleh penyelenggara pemilihan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM